

# EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA CIAKAR KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Agus Muhammad Fajar<sup>1</sup>, Lina Marliani<sup>2</sup>, Ahmad Juliarso<sup>3</sup>

Universitas Galuh Ciamis<sup>1,2,3</sup>

E-mail : agusmuhammadfajar18@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyampaian informasi oleh penyuluh KB kepada masyarakat Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis terkait pelaksanaan program KB kurang jelas, dan target KB tidak tercapai dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan seperti dokumen, buku, internet, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa efektivitas program Keluarga Berencana di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan diantaranya: tidak ada jadwal khusus untuk pelaksanaan sosialisasi program KB, tidak dilakukan pembinaan KB secara rutin oleh kader, Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih menginginkan mempunyai anak kemudian suami yang tidak memberikan izin. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu para kader melakukan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) pada saat pelaksanaan posyandu, kader melakukan pembinaan dengan cara langsung menemui Pasangan Usia Subur (PUS) ke rumahnya atau melalui media sosial, kader memberikan pemahaman lebih kepada Pasangan Usia Subur (PUS) tentang manfaat dan dampak positif dari mengikuti Program Keluarga Berencana (KB).*

**Kata Kunci :** Efektivitas, Program, Keluarga Berencana.

## PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dan peran masyarakat dengan cara mengatur kelahiran, meningkatkan ketahanan keluarga, dan meningkatkan ketenteraman keluarga

guna mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

Program Keluarga Berencana (KB) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, khususnya dalam pasal 18 dan 19.

Secara umum, program Keluarga Berencana ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui program kependudukan, serta melalui pembangunan dan keluarga berencana. Secara khusus, tujuan program Keluarga Berencana dibuat untuk memudahkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk membantu dan mendukung masyarakat serta mewujudkan program kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga.

Menurut Suratun dan Marmi, Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mengatur atau mengendalikan jumlah penduduk dengan cara menurunkan jumlah anak yang dilahirkan dan menetapkan batasan jumlah anak yang diharapkan sehingga mampu menciptakan keluarga kecil yang berkualitas.

Di Ciamis sendiri pihak yang berwenang untuk menaungi program Keluarga Berencana (KB) sendiri yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Dimana program KB sendiri tadinya ada di bawah naungan BKKBN namun sekarang ada perubahan nomenklatur dari BKKBN menjadi DP2KBP3A.

Pelaksanaan program KB di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah berjalan, kesadaran masyarakat terhadap KB sudah ada tapi ada beberapa yang masih belum menyadari akan pentingnya melakukan KB, dari jumlah Kartu Keluarga (KK) 1561 dan Pasangan Usia Subur (PUS) 810 baru ada 594 PUS yang sudah melaksanakan program KB, artinya pelaksanaan Program KB di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah berjalan 73% (persen).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan peneliti mengetahui bahwa Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis masih belum berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari adanya beberapa indikator-indikator, sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi oleh penyuluh KB kepada masyarakat Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis terkait pelaksanaan program KB kurang jelas sehingga kurang dimengerti masyarakat.
2. Target KB tidak tercapai dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, dari target 810 Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah di KB baru 594

PUS atau sudah berjalan 73% (persen).

Berdasarkan indikator permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA CIAKAR KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS”.

Efektivitas menurut Makmur (2015:6) mengemukakan bahwa : “Efektivitas adalah ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang di capai”. Selanjutnya merujuk pada kriteria efektivitas menurut Makmur (2015:7) sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu.

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Janganlah kita menyalahgunakan waktu karena apabila kita tidak menggunakan dengan tepat berarti kita akan mengalami kerugian karena waktu yang berlalu itu tidak akan kembali dan pergi selamanya.

2. Ketepatan perhitungan biaya.

Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat

diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran.

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada keefektivitasan kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyelesaian dikemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan

kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menentukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur, atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan berpikir.

Dengan demikian bahwa kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam

pelaksanaanya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan.

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan sasaran.

Tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan sebagai kegiatan itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk menegatuhi bagaimana Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data wawancara peneliti dengan informan yang berjumlah 8 orang. Adapun yang dijadikan informan pada penelitian ini terdiri dari 1 orang PPKBD, 3 orang Kader KB, 4 orang Pasangan Usia Subur (PUS). Sumber data sekunder yaitu data yang berdasarkan pada literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ditinjau berdasarkan 8 dimensi efektivitas, yang terdiri dari:

a. ketepatan penentuan waktu

- b. ketepatan perhitungan biaya
- c. ketepatan dalam pengukuran
- d. ketepatan dalam menentukan pilihan
- e. ketepatan berpikir
- f. ketepatan dalam menentukan tujuan
- g. ketepatan dalam melakukan perintah
- h. ketepatan sasaran.

Untuk penjelasan lebih lanjut, diuraikan sebagai berikut:

### **1. Ketepatan penentuan waktu**

#### **a. Ketepatan waktu dalam melakukan sosialisasi program KB**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan sosialisasi program KB di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum bisa dikatakan efektif, ada pelaksanaan sosialisasi saat kegiatan posyandu tetapi tidak ada sosialisasi secara khusus dan terbuka untuk Pasangan Usia Subur (PUS) perihal KB sendiri.

Menurut Sutrisno (2007: 125-126) menyatakan bahwa:

“Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.”

Sebagai mana menurut Berger dan Luckman (1990:201) menyatakan bahwa:

”agar sosialisasi berjalan lancar, tertib dan berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu

formal, terbentuk melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dan mensosialisasikan nilai norma dan peran-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat, dan informal sosialisasi ini terdapat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat kekeluargaan”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk indikator ketepatan waktu dalam melakukan sosialisasi program KB masih belum optimal. Dikarenakan waktu merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) maka sebaiknya pelaksanaan sosialisasi agar lebih efektif membuat jadwal untuk pelaksanaan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB). Karena sejauh ini dalam pelaksanaan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) masih terjadi ketidaksesuaian dimana pelaksanaan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) hanya dilakukan saat pelaksanaan posyandu saja, tidak ada penyuluhan atau sosialisasi secara khusus dan terbuka bagi Pasangan Usia Subur (PUS) perihal program Keluarga Berencana (KB).

Hambatan yang ditemukan dilapangan dalam pelaksanaan sosialisasi program KB yaitu tidak adanya jadwal secara khusus untuk melaksanakan sosialisasi program KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait pelaksanaan sosialisasi program Keluarga

Berencana (KB) yaitu para kader melakukan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) pada saat pelaksanaan posyandu.

#### **b. Rutinitas dalam melaksanakan pembinaan KB**

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembinaan KB di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum efektif, karena tidak dilakukan secara rutin hanya dilakukan sebelum Pasangan Usia Subur (PUS) akan ber KB setelah itu tidak ada pembinaan secara berkelanjutan.

Sebagai mana menurut Farida (2008: 19), menyatakan bahwa:

“Tepat waktu adalah perencanaan dan penjadwalan program yang lengkap dan tepat. Keterlambatan dapat dianggap sebagai akibat tidak dipenuhinya rencana jadwal yang telah dibuat, karena kondisi kenyataan tidak sama atau sesuai dengan kondisi saat jadwal tersebut dibuat”.

Dengan demikian, untuk indikator rutinitas dalam melaksanakan pembinaan KB belum optimal, dimana hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pembinaan secara rutin yang dilakukan oleh para kader, jadwal pembinaan yang tidak menentu dimana pembinaan hanya dilakukan diawal saja saat Pasangan Usia Subur (PUS) melakukan KB, dan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Farida (2008: 19). Sehingga menimbulkan masalah yaitu ketidaksesuaian antara pendapat ahli dengan kenyataan dilapangan.

Hambatan yang ditemukan dilapangan dalam pelaksanaan pembinaan KB tidak dilakukan secara rutin dikarenakan pelaksanaan sosialisasi program KB pun dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan posyandu jadi tidak ada waktu khusus untuk melakukan pembinaan KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS).

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu kader melakukan pembinaan dengan cara langsung menemui Pasangan Usia Subur (PUS) ke rumahnya atau melalui media sosial.

## **2. Ketepatan perhitungan biaya**

### **a. Ketepatan dalam penentuan biaya alat kontrasepsi**

Berdasarkan hasil penelitian penentuan biaya alat kontrasepsi itu berbeda-beda ada yang berbayar dan ada yang gratis. Untuk yang gratis itu ditujukan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki kartu BPJS itu pun hanya alat kontrasepsi pilihan yang dirasa pengunaanya sedikit.

Sebagai mana menurut Machfoedz (2005) menyatakan bahwa: "Penetapan harga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, meliputi tujuan pemasaran perusahaan, biaya, strategi bauran pemasaran, serta metode penetapan harga. Sementara itu, faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, serta elemen lingkungan yang lain".

Dengan demikian, bahwa untuk indikator ketepatan dalam penentuan biaya alat kontrasepsi sudah baik,

karena bagi yang mempunyai kartu BPJS tidak perlu mengeluarkan uang untuk menggunakan alat kontrasepsi, terkecuali alat kontrasepsi yang tidak bersubsidi maka yang mempunyai kartu BPJS pun harus membayar sesuai dengan alat kontrasepsi yang dipilih.

### **b. Ketepatan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi program KB**

Berdasarkan hasil penelitian selama ini pelaksanaan sosialisasi program KB minim menggunakan anggaran, dikarenakan pelaksanaan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan posyandu. Jika ada pelaksanaan sosialisasi secara khusus untuk program KB baru menggunakan anggaran yang telah di sediakan.

Sebagai mana menurut Makmur (2015:7-9) yang menyatakan bahwa: "Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan".

Dengan demikian untuk indikator ketepatan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi program KB dapat dikatakan belum efektif karena tidak relevan dengan teori Makmur (2015:7-9) dimana ketepatan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi program KB belum efektif dikarenakan pelaksanaan sosialisasi program KB tidak

dilaksanakan secara khusus tersendiri dan terbuka, hanya dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan posyandu, sehingga pelaksanaan sosialisasi program KB tidak memakai anggaran.

Hambatan yang ditemukan dilapangan perihal ketepatan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi program KB yaitu anggaran tidak digunakan sebagai mana mestinya dikarenakan tidak ada pelaksanaan sosialisasi KB secara khusus dan terjadwal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut kader menggunakan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi program KB pada saat pelaksanaan posyandu.

### **3. Ketepatan dalam pengukuran**

#### **a. Ketepatan dalam memberikan pelayanan KB sesuai dengan standar operasional Prosedur (SOP)**

Berdasarkan hasil penelitian Ketepatan dalam memberikan pelayanan KB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah bagus karena penyuluh sebelumnya mendapatkan pelatihan terlebih dahulu.

Selaras dengan pandangan Dwi Rakhmawati (2022) menjelaskan bahwa:

“Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting bagi suatu perusahaan atau lembaga baik besar atau kecil karena berfungsi sebagai pedoman dan landasan hukum yaitu pedoman untuk mengantisipasi situasi atau keadaan yang tidak terduga sekaligus acuan melaksanakan pekerjaan”.

Dengan demikian, untuk indikator ketepatan dalam memberikan pelayanan KB sesuai dengan standar operasional Prosedur (SOP) sudah berjalan optimal, dimana para kader sudah melakukan prosedur yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS). Hal itu selaras dengan pendapat Dwi Rakhmawati (2022) dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman penting bagi suatu perusahaan atau lembaga.

#### **b. Keakuratan pemberian alat kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur (PUS)**

Berdasarkan hasil penelitian keakuratan pemberian alat kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur (PUS) tidak dapat dijamin karena dikembalikan kepada pasien yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) apabila kondisi badannya bagus dan alat kontrasepsinya cocok maka bisa dikatakan akurat.

Kemudian menurut Hidayati (2022:6) yang menyatakan bahwa:

”Tercapainya tujuan dari penyuluhan dapat dipengaruhi oleh proses didalamnya. Proses tersebut terdiri dari tiga komponen utama yaitu input, process dan output. Input merupakan subjek atau sasaran seperti individu, kelompok atau masyarakat. Process adalah mekanisme terjadinya perubahan pada subjek. Output adalah hasil dari proses baik berupa pengetahuan atau perubahan perilaku”.

Dengan demikian, untuk indikator keakuratan pemberian alat



kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur (PUS) sudah optimal, ditandai dengan sedikit nya angka kelahiran bayi yang disebabkan karena Pasangan Usia Subur (PUS) memilih langsung alat kontrasepsi yang akan dipakai dan di sesuaikan dengan kondisi tubuhnya sehingga pemilihan alat kontrasepsi efektif. Hal itu selaras dengan teori Hidayati (2022:6) dimana tercapainya tujuan dari penyuluhan dapat dipengaruhi oleh proses didalamnya.

#### **4. Ketepatan dalam menentukan pilihan**

##### **a. Masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan alat kontrasepsi yang akan di pakai**

Berdasarkan hasil penelitian Pasangan Usia Subur (PUS) dipersilakan atau diberikan kebebasan dalam menentukan alat kontrasepsi yang akan dipakai tidak ada penekanan dari pihak penyuluh untuk menggunakan alat kontrasepsi tertentu, penyuluh hanya memberikan saran.

Sebagai mana menurut John Stuart Mill (2005) dijelakasn bahwa: “Kebebasan adalah suatu kondisi dimana manusia dapat bertindak tanpa dihalang-halangi orang lain”.

Dengan demikian, untuk indikator masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan alat kontrasepsi yang akan di pakai sudah berjalan optimal, dimana Pasangan Usia Subur (PUS) diberikan kebebasan dalam menentukan alat kontrasepsi yang akan dipakai dikarenakan Pasangan Usia Subur (PUS) lebih tahu

alat kontrasepsi yang tepat untuk dirinya dan juga lebih tahu terhadap kondisi badan Pasangan Usia Subur (PUS) itu sendiri. Hal itu selaras dengan teori John Stuart Mill (1859) dimana Pasangan Usia Subur (PUS) bebas bertindak dan memilh tanpa dihalang-halangi oleh kader dalam memilih alat kontrasepsi.

##### **b. Adanya penjelasan kepada masyarakat perihal manfaat KB**

Berdasarkan hasil penelitian ada penjelasan dari penyuluh dan kader dijelaskan manfaat KB, kelebihan dan kekurangannya, efek sampingnya dan proses nya bagaimana.

Sebagai mana menurut Hidayati (2022:4) yang menyatakan bahwa:

“Metode ceramah adalah suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga memperoleh informasi”.

Dengan demikian, untuk indikator adanya penjelasan kepada masyarakat perihal manfaat KB sudah berjalan optimal, dimana para kader memberikan penjelasan tentang program Keluarga Berencana (KB) manfaat KB, serta kekurangannya, efek sampingnya, dan cara kerjanya. Dimana para kader memberikan penjelasan dengan cara pendekatan emosional sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) diharapkan mau dan mampu untuk melaksanakan KB.

## **5. Ketepatan berpikir**

### **a. Masyarakat diberikan waktu untuk berpikir dalam memilih alat kontrasepsi**

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat diberikan waktu diberikan pilihan dalam menentukan atau memilih alat kontrasepsi yang akan dipakai walaupun sudah diberikan pengarahan dan saran oleh penyuluh.

Sebagai mana menurut Sulthoniyah (2017: 8) menjelaskan bahwa:

“Berpikir adalah kemampuan seseorang dalam mengingat, mempertimbangkan sesuatu serta dapat mengambil keputusan suatu masalah yang dihadapi”.

Dengan demikian, untuk indikator masyarakat diberikan waktu untuk berpikir dalam memilih alat kontrasepsi sudah berjalan optimal, dimana Pasangan Usia Subur (PUS) diberikan waktu untuk berpikir dalam memilih dan menentukan alat kontrasepsi yang akan dipakai oleh nya, sehingga akan efektif dalam penentuan alat kontrasepsi karena dipilih di pertimbangkan dan dipikirkan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) itu sendiri.

### **b. Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki pengetahuan tentang KB**

Berdasarkan hasil penelitian Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki pengetahuan tentang KB ada sebagian yang sudah memiliki pengetahuan tentang KB dan sebagian lagi belum sama sekali.

Sebagai mana menurut Notoatmodjo dalam Albunsiyary (2020) menjelaskan bahwa:

“Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang yang mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan. Pengetahuan yaitu seseorang yang tidak secara mutlak dipengaruhi oleh pendidikan karena pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman masa lalu, namun tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami informasi yang diterima yang kemudian menjadi dipahami”.

Dengan demikian, untuk indikator Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki pengetahuan tentang KB sudah berjalan optimal, dimana sebagian besar Pasangan Usia Subur (PUS) sudah memiliki pengetahuan umum tentang KB akan tetapi tidak mengetahui secara spesifik dan menyeluruh, dimana hal tersebut terjadi karena beriringan dengan perkembangan zaman dan teknologisehingga Pasangan Usia Subur (PUS) dapat memperoleh pengetahuan tentang KB dari mana saja, akan tetapi tidak semua Pasangan Usia Subur (PUS) melek terhadap kemajuan teknologi sehingga tetap kader harus memberikan sosialisasi secara langsung kepada Pasangan Usia Subur (PUS) perihal program Keluarga Berencana (KB).

**6. Ketepatan dalam menentukan tujuan**

**a. Kesanggupan penyuluh KB untuk melayani masyarakat dalam pelaksanaan KB**

Berdasarkan hasil penelitian kesanggupan penyuluh KB untuk melayani masyarakat dalam pelaksanaan KB dapat disimpulkan sudah bagus mereka selalu siap dan sigap dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya menurut Riyanto dalam (Nurhidayati & Silpia 2018) menyatakan bahwa:

“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan”.

Dengan demikian, untuk indikator kesanggupan penyuluh KB untuk melayani masyarakat dalam pelaksanaan KB sudah optimal, dimana para kader selalu siap siaga melayani Pasangan Usia Subur (PUS) dalam pelaksanaan KB, bahkan para kader sanggup untuk mendampingi Pasangan Usia Subur (PUS) kapan saja ketika Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki keluhan dan ingin konsultasi para kader selalu siap untuk melayani.

**b. Arahan yang jelas dari penyuluh KB kepada masyarakat perihal KB**

Berdasarkan hasil penelitian Pasangan Usia Subur (PUS) selalu disarankan melakukan KB untuk menghindari kelahiran anak yang tidak diinginkan, dengan berbagai alat kontrasepsi yang ada baik jangka pendek maupun jangka panjang selalu diberikan penjelasan perihal manfaat KB, kelebihan dan kekurangannya.

Sebagai mana menurut Levis (2021:63) yang menyatakan bahwa:

“Penyuluhan merupakan suatu usaha pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru”.

Dengan demikian, untuk indikator arahan yang jelas dari penyuluh KB kepada masyarakat perihal KB sudah berjalan optimal karena sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Levis (2021:63), dimana penyuluh memberikan suatu pemahaman tentang KB dan mengajak para Pasangan Usia Subur (PUS) untuk melakukan KB supaya bisa menghasilkan keluarga sejahtera.

**7. Ketepatan dalam melakukan perintah**

**a. Penentuan target jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan KB**

Berdasarkan hasil penelitian penentuan target jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan KB, ditentukan dari jumlah Kartu Keluarga, kemudian dilihat dari jumlah pasangan yang sudah menikah juga dilihat mempunyai anak berapa.

Sebagai mana menurut James L. Gibson (Kurniawan, 2013:109) menyatakan bahwa:

“Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai”.

Dengan demikian, untuk indikator penentuan target jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan KB belum optimal, dikarenakan pola pikir dari Pasangan Usia Subur (PUS) nya sendiri, dimana masih ada Pasangan Usia Subur (PUS) yang menginginkan mempunyai anak lebih dari dua dengan alasan banyak anak banyak rezeki, kemudian masih ada rasa takut dari diri Pasangan Usia Subur (PUS) untuk melakukan KB, sampai suami yang tidak memberikan izin kepada istri untuk melakukan KB. Sehingga target dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan KB belum tercapai sepenuhnya.

Hambatan yang timbul dalam pencapaian target yaitu adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih menginginkan mempunyai anak kemudian suami yang tidak memberikan izin untuk ber KB, dan ada juga Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih memiliki rasa takut untuk di KB.

Upaya yang dilakukan oleh kader untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu kader memberikan pemahaman lebih kepada Pasangan Usia Subur (PUS) tentang manfaat dan dampak

positif dari mengikuti Program Keluarga Berencana (KB)

#### **b. Penggunaan alat kontrasepsi dalam waktu jangka panjang**

Berdasarkan hasil penelitian Pasangan Usia Subur (PUS) merespon dengan baik perihal penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dikarenakan lebih efisien dalam penggunaannya.

Sebagai mana menurut Wiknjosastro (2007) menyatakan bahwa:

“Alat kontrasepsi yang ideal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: dapat dipercaya, tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan, daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan, tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan hubungan seksual, tidak memerlukan motivasi terus menerus, mudah pelaksanaannya, murah harganya sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan”.

Dengan demikian, untuk indikator penggunaan alat kontrasepsi dalam waktu jangka panjang sudah berjalan optimal, ditandai dengan adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dimana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ini banyak kelebihanannya yaitu lebih efisien dan juga risiko hamil nya lebih sedikit, namun hal tersebut harus lebih ditingkatkan dengan cara melakukan

sosialisasi lebih intens mengingat masih ada Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki rasa khawatir terhadap penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.

## **8. Ketepatan sasaran.**

### **a. Ketepatan sasaran dari program KB**

Berdasarkan hasil penelitian ketepatan sasaran program KB sudah bisa dikatakan tepat sasaran karena ditujukan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu pasangan yang usianya kurang dari 49 tahun, kemudian bisa dilihat dari angka kelahiran yang sedikit.

Sebagai mana menurut Sanjaya (2015: 11) menyatakan bahwa:

“Suatu program harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena sebagai tolak ukur dari proses serta output yang dihasilkan. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka efektif dan efisien dikatakan tidak berhasil atau gagal”.

Dengan demikian, untuk indikator ketepatan sasaran dari program KB sudah optimal atau tepat sasaran, ditandai dengan sedikitnya angka kelahiran di Desa Ciakar, lalu yang melakukan KB itu sendiri yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang berusia 23 tahun sampai dengan 41 tahun, dimana umur tersebut merupakan umur yang termasuk kedalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS).

### **b. Ketepatan pemilihan alat kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS)**

Berdasarkan hasil penelitian ketepatan pemilihan alat kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dikembalikan lagi kepada pemakai yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) itu sendiri dikarenakan harus disesuaikan dengan kondisi tubuh dari Pasangan Usia Subur (PUS) apakah memungkinkan atau tidak.

Sebagai mana menurut Makmur (2015: 8) menyatakan bahwa:

“Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri”.

Dengan demikian, untuk indikator ketepatan pemilihan alat kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS) sudah optimal, dikarenakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang memilih langsung alat kontrasepsi apa yang akan digunakan olehnya sehingga dia lebih tahu alat kontrasepsi apa yang lebih tepat bagi dirinya, selain itu ada pemeriksaan kondisi badan Pasangan Usia Subur (PUS) sebelum pemakaian alat kontrasepsi, sehingga bisa memaksimalkan kinerja dari pada alat

kontrasepsi yang dipilih oleh Pasangan Usia Subur (PUS).

## **KESIMPULAN**

Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diketahui belum optimal, dimana ada 8 dimensi dan 16 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, ada 12 indikator yang berjalan dengan baik dan ada 4 indikator yang belum berjalan dengan baik. Seperti: Ketepatan waktu dalam melakukan sosialisasi program KB, Rutinitas dalam melaksanakan pembinaan KB, Ketepatan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi program KB, Penentuan target jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang melakukan KB.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dari hasil observasi dan wawancara antara lain: pelaksanaan sosialisasi program KB tidak adanya jadwal secara khusus, tidak adanya pelaksanaan sosialisasi secara terbuka tentang program Keluarga Berencana (KB) kepada Pasangan Usia Subur (PUS), pelaksanaan pembinaan KB tidak dilakukan secara rutin, anggaran hanya digunakan sesekali dikarenakan tidak ada pelaksanaan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) secara khusus dan terjadwal, dan adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih menginginkan mempunyai anak kemudian suami yang tidak memberikan izin untuk ber KB, dan ada juga Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih memiliki rasa takut untuk di KB.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu para kader melakukan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) pada saat pelaksanaan posyandu, kader melakukan pembinaan dengan cara langsung menemui Pasangan Usia Subur (PUS) ke rumahnya atau melalui media sosial, kader menggunakan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi program KB pada saat pelaksanaan posyandu, dan kader memberikan pemahaman lebih kepada Pasangan Usia Subur (PUS) tentang manfaat dan dampak positif dari mengikuti Program Keluarga Berencana (KB).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3E.
- Farida, 2008. *Manajemen Waktu*. Bandung: Syaamil Cipta Media
- Gibson, James. L., et al. 2010. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi Ke-5. Jakarta. Erlangga
- Levis, Leta Rafael. 2021. *Komunikasi Penyuluhan Pedesaan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Machfoedz, Mahmud. 2005. *Pengantar Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan

- Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Makmur, 2015. Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan, Bandung: Refika Aditama
- Mill, John Stuart, On Liberty, Terj. Alex Lanur, On Liberty : Perihal Kebebasan, Jakarta : Yayasan Obor, 2005
- Sanjaya. 2015. Model Pengajaran Dan Pembelajaran. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sutrisno. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wiknjosastro, dkk. 2007. Ilmu Kebidanan. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Albunsiyary, Achmad, Muninghar, dan Fatimah Riswati. Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman Kerja, Kompetensi SDM dan Pengembangan Karier Terhadap Prestasi Kerja Personel Polsek Pamekasan. MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik), Vol. 3, No. 1, pp. 19-37.
- Hidayati Rahmi, M . N (2022). Penerapan Metode Haversine Formula Pada Pencarian Lokasi Fasilitas Kesehatan Terdekat. Media Informatika, 278-279
- Sulthoniyah, Anni. 2017. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Materi Aritmetika Sosial:.. Skripsi Purworejo. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo
- Riyanto, A. (2018). Implikasi Kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Pada PDAM Cibadak Sukabumi. Jurnal Ecodemica, 2(1), 117–124.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.